

KENDALA FORUM KADER BELA NEGARA LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN KESADARAN BELA NEGARA: KAJIAN SOSIOLOGI PERTAHANAN

OBSTACLES OF THE FKBN (STATE DEFENSE CADRE FORUM) LAMPUNG IN NATIONAL INCREASING STATE DEFENSE AWARENESS: A STUDY OF THE SOCIOLOGY OF DEFENSE

Bartoven Vivit Nurdin¹, Arsella Mutiara Sindi², Branden Jaya Tivantara³

UNIVERSITAS LAMPUNG

(bartoven.vivit@fisip.unila.ac.id, arsellamutiara.sindi21@students.unila.ac.id,
brandenjayaivantara@gmail.com)

Abstrak – Lampung memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen sehingga penanaman kesadaran bela negara penting dilakukan sebagai upaya membangun nilai-nilai yang mengintegrasikan perbedaan. Namun, peningkatan kesadaran bela negara melalui pengelolaan sumber daya nasional yang melibatkan Forum Kader Bela Negara (FKBN) masih menghadapi sejumlah kendala. Aspek manusia, budaya, struktur sosial, dan pertahanan dalam perspektif sosiologi pertahanan belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam pembentukan dan pelaksanaan FKBN. Penelitian ini bertujuan mengkaji aspek sosiologi FKBN di Lampung sebagai agen sosial dalam meningkatkan kesadaran bela negara serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui triangulasi, peer review, dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai kegiatan FKBN Lampung berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesadaran bela negara. Namun, potensi tersebut belum optimal karena keterbatasan inovasi, kendala perekrutan kader yang memiliki kualifikasi sumber daya manusia yang memadai, keterbatasan anggaran, perizinan kegiatan, serta dominasi anggota berusia lanjut akibat rendahnya minat pemuda untuk bergabung. Kondisi ini menunjukkan bahwa FKBN belum optimal menjalankan peran sebagai simbol dan agen sosial dalam struktur sosial masyarakat. Selain itu, masyarakat masih dipengaruhi pola pikir oposisi biner antara sipil dan militer. Pola pikir tersebut tercermin dalam pandangan bahwa bela negara merupakan urusan militer, bukan sipil; bagian dari hegemoni militer terhadap masyarakat sipil; serta respons terhadap ancaman negara yang menjadi tanggung jawab militer semata. Secara holistik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan FKBN belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif antropologi dan sosiologi, khususnya dalam melibatkan budaya masyarakat, struktur sosial, jaringan sosial, dan agen sosial.

Kata Kunci: Agen sosial, bela negara, FKBN, sosiologi pertahanan, struktur sosial.

Abstract – Lampung is characterized by a heterogeneous society, making state defense awareness important for fostering values that bridge social differences. However, efforts to raise state defense awareness through national resource management involving the State Defense Cadre Forum (Forum Kader Bela Negara, FKBN) continue to face several challenges. From a defense sociology perspective, the establishment and implementation of the FKBN have not fully considered human factors, culture, social structure, and defense. This study examines the sociological dimensions of the FKBN in Lampung as a social agent in promoting state defense awareness and identifies the challenges it faces. This qualitative study collected data through in-depth interviews, participant observation, and documentation. The study assessed data credibility through triangulation, peer review, and member checking. The findings indicate that FKBN activities have the potential to significantly increase state

defense awareness. However, this potential remains unrealized because of limited innovation, difficulty recruiting qualified cadres, budget constraints, activity permit requirements, and the predominance of older members amid limited youth interest in joining the forum. Consequently, the FKBN has yet to fully perform its role as a symbol and social agent within the community's social structure. Public perceptions also remain influenced by a binary opposition between civilians and the military, reflected in views that state defense is exclusively a military responsibility, represents military hegemony over civilians, and places responses to national threats solely within the military's domain. Overall, these findings suggest that FKBN implementation has not fully integrated anthropological and sociological perspectives, particularly regarding local culture, social structures, social networks, and social agents.

Keywords: Social agents, state defense, FKBN, defense sociology, social structure

Pendahuluan

Secara fundamental, Bela Negara dimanifestasikan sebagai rasa cinta terhadap negara yang sekaligus dapat diidentifikasi menjadi dua tipe, yaitu fisik dan nonfisik. Bela Negara secara fisik ditandai dengan keterlibatan dalam perang, sedangkan nonfisik melibatkan pengabdian dan pendidikan dalam aspek kewarganegaraan (Azzahra et al., 2024). Sebagai bagian dari upaya pertahanan negara, bela negara memerlukan dukungan kebijakan dan kelembagaan yang memadai. Dalam konteks tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan membentuk Direktorat Bela Negara untuk mendukung penguatan kesadaran dan pelaksanaan bela negara di masyarakat.

Direktorat Bela Negara dibentuk sebagai bagian dari upaya memperkuat kesadaran bela negara di kalangan masyarakat Indonesia. Upaya tersebut

sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, yang menekankan pentingnya peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai komponen bangsa dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Dalam pelaksanaannya, keterlibatan organisasi kemasyarakatan, seperti Forum Kader Bela Negara (FKBN), dapat menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya tersebut.

Pertahanan negara merupakan instrumen utama dalam menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan segenap bangsa (Herawati et al., 2025). Pelaksanaannya tidak terlepas dari dinamika ancaman yang dihadapi sehingga memerlukan penyesuaian strategi secara berkelanjutan (Supriyatno, 2014). Ancaman terhadap negara dapat berbentuk ancaman militer,

nonmiliter, maupun gabungan keduanya. Oleh karena itu, penguatan pertahanan negara perlu dilakukan melalui sinergi strategi militer dan nonmiliter untuk meningkatkan daya tangkal terhadap berbagai bentuk ancaman (Maharani et al., 2024).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 terkait Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara menetapkan kerangka kebijakan strategis dalam pengoptimalan sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya buatan, serta infrastruktur nasional sebagai pendukung kekuatan pertahanan negara. Aturan ini menempatkan pembinaan sebagai instrumen utama dalam internalisasi nilai-nilai dasar bela negara, sehingga penguatan pertahanan tidak selalu bertumpu pada dimensi material, tetapi juga pada dimensi kesadaran dan partisipasi warga negara (Putriana, 2021). Dalam konteks tersebut, bela negara menjadi pilar krusial bagi terjaganya keutuhan wilayah, kedaulatan, dan keberlangsungan hidup bangsa, yang diwujudkan melalui sikap dan tindakan warga negara, baik itu secara kolektif maupun individual, yang didasari oleh rasa cinta tanah air (Kementerian Pertahanan RI, 2019). Sehingga tanggung

jawab bela negara tidak hanya terbatas di militer atau institusi pemerintah, melainkan menjadi kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat (Akbar et al., 2024).

Pembinaan bela negara tersebut diwujudkan melalui Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) sebagai produk kebijakan pemerintah untuk memperkuat daya tangkal pertahanan negara dari segala ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri (Maharani et al., 2024). Berbagai ancaman modern, termasuk dampak negatif globalisasi, yang berpotensi menjadi sumber pelemahan nilai-nilai Pancasila dan karakter bangsa. Untuk itu, penguatan patriotisme dan komitmen bela negara menjadi penting untuk ditumbuhkan secara berkelanjutan dalam diri setiap individu warga negara (Sukowati et al., 2024). Perkembangan bentuk ancaman terhadap identitas dan kedaulatan bangsa di era globalisasi, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, menuntut kesiapsiagaan seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat sipil, untuk turut serta dalam memperkuat ketahanan nasional dengan berpartisipasi dalam program bela negara.

Bela negara menjadi kewajiban bagi seluruh komponen bangsa diseluruh wilayah Indonesia, yang terdiri dari

masyarakat majemuk. Provinsi Lampung sebagai satu dari sekian wilayah yang memiliki masyarakat majemuk, sebagai konsekuensi proses migrasi yang berlangsung sejak lama sampai saat ini. Kemajemukan tersebut bukan hanya menghasilkan keuntungan potensi sosial, namun di sisi lain menghadirkan tantangan tersendiri dalam implementasi nilai-nilai bela negara.

Dalam kondisi tersebut, Forum Kader Bela Negara (FKBN) di Provinsi Lampung sebagai organisasi dibawah naungan Kementerian Pertahanan RI berpotensi besar sebagai penggerak kesadaran Bela Negara karena memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran Bela Negara di Lampung. Namun hal tersebut masih belum terlaksana secara maksimal karena terdapat beberapa kendala diantaranya adalah pola pengkaderan dan kegiatan organisasi yang masih belum mencapai tujuan diadakannya FKBN ini.

Sejumlah penelitian terdahulu menyoroti bela negara dari sudut pandang sosiologi pertahanan, dengan menekankan pergeseran makna dari sekadar kewajiban normatif menuju hubungan yang lebih dinamis andatar sipil dan militer dalam sistem pertahanan negara (Yusuf, 2023).

Untuk menciptakan ketahanan nasional, pendekatan bela negara yang sebelumnya cenderung militeristik kini menjadi pendekatan multidimensi, yaitu mencakup internalisasi nilai bela negara melalui pendidikan seperti pembentukan kurikulum, penguatan literasi digital, dan berbagai sosialisasi keberlanjutan (Akbar et al., 2024; Gredinand, 2017; Leonardi, 2014; Sahadi, 2017; Soepandji & Farid, 2018; Wahyudi, 2017).

Dalam kajian filsafat pertahanan dimensi historis bela negara direfleksikan sebagai upaya pembentukan identitas nasional melalui pendidikan. Pendidikan pertahanan dianggap strategis untuk membangun kesadaran keamanan nasional masyarakat secara menyeluruh, terutama dalam menghadapi dinamika global dan tantangan regional (Miharja et al., 2024). Melalui sudut pandang konstruksi sosial, internalisasi nilai-nilai bela negara perlu dilaksanakan dengan konteks lokas sebagai dasar pembentukan kesadaran kolektif masyarakat (Nabawi & Ummah, 2024).

Pada level kebijakan, implementasi Rencana Aksi Nasional Bela Negara menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengintegrasikan nilai-nilai bela negara ke dalam program pembangunan nasional (Subagyo, 2019). Keseriusan

tersebut juga tercermin dalam peran organisasi kepemudaan sebagai medium penguatan nasionalisme dan pencegahan radikalisme (Midhio et al., 2019; Novyanti et al., 2019). Di Perkotaan, penguatan forum bela negara dilakukan dengan pelatihan manajemen kegiatan untuk mendukung program bela negara (Cahyani et al., 2020). Perkembangan ini memberikan makna penempatan nilai bela negara tidak lagi hanya sebagai instrumen pertahanan, melainkan juga sebagai medium penguatan rasa solidaritas sosial di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap negara (Akbar et al., 2024; Gusti et al., 2025). Penelitian Hartono (2022) menekankan pentingnya pemanfaatan media digital dan platform sosial lainnya dalam mengintegrasikan nilai-nilai bela negara kepada masyarakat, khususnya dalam konteks ketahanan nasional di era digital.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, secara empiris FKBN sebagai organisasi kemasyarakatan dibawah pembinaan Kementerian Pertahanan menunjukkan stagnasi dan keterbatasan sumber daya manusia, terutama di wilayah Provinsi Lampung. Kajian yang secara khusus menempatkan FKBN sebagai agen sosial dalam konteks

lokal Lampung dapat dikatakan relatif terbatas.

Secara teoretis, penelitian ini dapat memperluas kajian sosiologi pertahanan dengan menganalisis FKBN sebagai aktor sosial yang beroperasi dalam relasi struktur dan agensi antara negara dan masyarakat. Dalam pengertian ini, bela negara tidak lagi hanya dipahami semata sebagai lingkup militer, tetapi mencakup proses pembangunan karakter, integrasi sosial, serta konstruksi sosial yang dinegosiasikan oleh aktor-aktor lokal melampaui batas normatif formal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sosiologis peran dan dinamika FKBN di Provinsi Lampung.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konstruktivis untuk memahami konstruksi makna dan penafsiran atas pengalaman individu (Denzin & Lincoln, 2008). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam secara berulang, observasi partisipan dengan keterlibatan langsung dalam kegiatan FKBN, serta dokumentasi berupa dokumen tertulis dan foto yang diperoleh dari informan.

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan

relevansi informasi yang dimiliki, meliputi 10 pegawai Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, 10 anggota dan pengurus FKBN di Provinsi Lampung, serta 5 peserta kegiatan sosialisasi FKBN. Total 25 informan ditetapkan dengan mempertimbangkan kejenuhan data, yaitu ketika pengumpulan data tidak lagi menghasilkan informasi atau pola temuan baru.

Analisis dan validasi data dilakukan melalui triangulasi, peer review, dan member checking. Triangulasi digunakan untuk memeriksa konsistensi temuan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peer review melibatkan penelaahan kritis oleh peneliti lain atau ahli yang relevan, sedangkan member checking dilakukan dengan meminta umpan balik informan untuk memastikan kesesuaian interpretasi dengan perspektif mereka.

Hasil dan Pembahasan

Bela Negara

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2019). Kesadaran bela negara diwujudkan melalui sikap berbakti dan kesediaan berkorban bagi negara sesuai dengan

kondisi serta bentuk ancaman yang dihadapi (Putri et al., 2020). Kesadaran tersebut tercermin dalam lima nilai dasar bela negara, yaitu (1) cinta tanah air, (2) kesadaran berbangsa dan bernegara, (3) kesetiaan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, (4) kerelaan berkorban demi bangsa dan negara, serta (5) kemampuan dasar bela negara.

Kelima nilai tersebut menjadi landasan pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab dan peduli terhadap keberlangsungan bangsa. Oleh karena itu, program bela negara perlu dilaksanakan secara optimal untuk memperkuat ketahanan nasional.

Bela negara merupakan salah satu bentuk pengelolaan sumber daya nasional (SDN) untuk pertahanan negara, selain pembentukan Komponen Cadangan. Pembangunan kekuatan pertahanan perlu didukung oleh kemampuan mengelola sumber daya nasional agar dapat menghasilkan kekuatan pertahanan yang efektif (Sebastian, 2015; Zulkarnain & Runturambi, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, pengelolaan SDN dilaksanakan melalui upaya bela negara, pembentukan

Komponen Cadangan, penguatan komponen utama, penataan komponen pendukung, serta mobilisasi dan demobilisasi (Hakim et al., 2020).

Forum Kader Bela Negara (FKBN)

Forum Kader Bela Negara (FKBN) merupakan organisasi kemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan berfokus pada penguatan kesadaran bela negara. FKBN berawal dari inisiatif kader bela negara di lingkungan Kementerian Pertahanan yang mendorong keterlibatan masyarakat secara bottom-up dalam upaya meningkatkan kesadaran bela negara. Melalui berbagai program, FKBN membentuk kader di berbagai wilayah dengan melibatkan beragam elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan anggota organisasi kemasyarakatan, untuk mendukung upaya pertahanan negara.

Dalam pelaksanaannya, FKBN berperan sebagai mitra pemerintah dan nonpemerintah dalam menyosialisasikan nilai-nilai bela negara. Forum ini juga menjadi wadah gerakan kolektif untuk mendukung sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Selain menyosialisasikan nilai-nilai bela negara, FKBN berupaya membangun karakter kebangsaan dan memperkuat fungsi kontrol sosial agar nilai-nilai tersebut tercermin dalam sikap dan praktik sosial masyarakat (Wahyudi, 2017).

Peta berikut menunjukkan persebaran kader bela negara di Indonesia.



Gambar 1 Peta Persebaran Kader Bela Negara
Sumber: Kementerian Pertahanan RI, 2024

Tabel 1. Persebaran Kader Bela Negara

No.	Tahun	Program	Non Program
1.	2020	4.030	54.853
2.	2021	11.300	13.848
3.	2022	1.410	49.357
4.	2023	10.712	20.232
5.	2024	8.020	10.871
Jumlah		35.472	149.161
		184.633	

Dilihat secara kuantitatif pada Tabel 1, jumlah kader bela negara tergolong besar. Namun, jumlah tersebut belum cukup untuk menunjukkan bahwa kader telah berperan secara optimal dalam mendukung kebijakan pertahanan negara. Data juga menunjukkan fluktuasi jumlah kader program dan nonprogram

setiap tahunnya, serta kesenjangan jumlah antara kedua kategori tersebut. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap sistem pembinaan, rekrutmen, dan pelibatan aktif kader dalam kegiatan yang mendukung pertahanan negara. Dengan demikian, evaluasi FKBN perlu mempertimbangkan tidak hanya jumlah kader, tetapi juga kualitas partisipasi dan kontribusinya agar peran FKBN tidak berhenti pada aspek simbolis, melainkan memberikan kontribusi substantif terhadap ketahanan nasional.

Realitas FKBN di Lampung

Forum Kader Bela Negara (FKBN) melibatkan warga negara dari berbagai latar belakang pekerjaan, lingkungan tempat tinggal, dan pendidikan. Pembentukan kader dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan, diseminasi, dan pelatihan. Kader bela negara merupakan warga negara Indonesia yang telah mengikuti Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang diselenggarakan oleh pemerintah atau nonpemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memiliki sertifikat kader bela negara.

Secara organisatoris, FKBN Provinsi Lampung memiliki sejumlah divisi,

meliputi Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara; Ekonomi dan UMKM; Pertahanan dan Politik, Hukum, dan Keamanan; Penanggulangan Radikalisme dan Penguatan Ideologi Pancasila; Pemuda dan Olahraga; Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan; Pencegahan Narkoba; Kaderisasi dan Keanggotaan; Pengamanan Khusus; Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga; Hubungan Masyarakat; serta Kebencanaan. Setiap divisi memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang diarahkan untuk mendukung visi organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, FKBN bertujuan membentuk karakter bangsa yang beridentitas, memiliki kebanggaan nasional, dan menjunjung semangat kebangsaan yang dilandasi kecintaan terhadap tanah air. Misi organisasi ini mencakup penanaman kesadaran bela negara, penguatan nilai-nilai Pancasila, dan peningkatan nasionalisme masyarakat. Tujuan tersebut sejalan dengan peran kader bela negara dalam meningkatkan kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajibannya melalui pengabdian sesuai dengan keahlian dan profesi masing-masing (Roringkon & Aris Sarjito, 2021).

Dalam pelaksanaannya, kader diharapkan berperan sebagai agen sosial

yang aktif menanamkan nilai-nilai bela negara di masyarakat. Peran tersebut mencakup penguatan karakter kader, penumbuhan kesadaran bela negara di seluruh lapisan masyarakat, serta pembinaan sumber daya manusia di bidang pertahanan negara dengan tetap memperhatikan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal. Upaya tersebut juga diarahkan untuk memperkuat persatuan, menjaga kedaulatan negara, dan membangun ketahanan nasional.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi selama penelitian pada 2024–2025, FKBN Provinsi Lampung cukup aktif melaksanakan dan mengikuti berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan yang tercatat adalah tujuh kali sosialisasi bela negara yang melibatkan Kementerian Pertahanan di Lampung. Sosialisasi juga menjangkau lingkungan pendidikan, antara lain SMTI, SMAN 5, SMAN 4, dan sejumlah perguruan tinggi di Bandar Lampung. Kegiatan tersebut mendapat respons antusias dari siswa, mahasiswa, dan guru. Namun, antusiasme peserta belum diikuti program lanjutan yang terstruktur. Sosialisasi masih menjadi bentuk kegiatan yang dominan, sehingga jangkauan dan keberlanjutan program di masyarakat belum optimal.

Selain sosialisasi, FKBN Lampung terlibat dalam pelatihan insan pers bela negara, kerja sama dengan pemerintah daerah, kegiatan sosial dan keagamaan, serta kegiatan yang mendukung ekonomi dan budaya lokal. FKBN juga pernah menyelenggarakan pelatihan bela negara bagi generasi muda dari masyarakat adat Lampung. Kegiatan tersebut mendapat respons positif dari peserta, tetapi belum berlanjut secara konsisten. Sejumlah kegiatan lainnya masih bergantung pada inisiatif FKBN Pusat di Jakarta dan Direktorat Bela Negara Kementerian Pertahanan, terutama ketika program dilaksanakan dalam skala besar.

Secara umum, kegiatan FKBN dapat dikelompokkan ke dalam lima bidang. Pertama, pendidikan dan pelatihan, termasuk diklat insan pers bela negara dan pelatihan bagi generasi muda masyarakat adat. Kedua, sinergi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kecintaan terhadap tanah air dan kesadaran bela negara. Ketiga, pembinaan wawasan kebangsaan melalui penguatan nilai-nilai Pancasila dan persatuan nasional. Keempat, kegiatan sosial dan ekonomi, termasuk kegiatan keagamaan, pengembangan koperasi, serta dukungan terhadap usaha produktif di bidang pengolahan makanan dan

minuman berbasis potensi lokal. Namun, pengembangan koperasi dan kegiatan ekonomi produktif tersebut belum berjalan optimal. Kelima, pelestarian budaya lokal, antara lain melalui kegiatan seni dan tarian tradisional yang melibatkan masyarakat adat.

Meskipun memiliki beragam kegiatan, FKBN Lampung belum sepenuhnya menunjukkan kemandirian dalam merancang dan melaksanakan program. Banyak kegiatan masih berupa partisipasi dalam agenda FKBN Pusat atau Direktorat Bela Negara Kementerian Pertahanan. Inisiatif dan inovasi dari pengurus daerah juga belum berkembang secara optimal. Akibatnya, kegiatan cenderung bersifat seremonial dan belum diikuti pembinaan berkelanjutan yang dapat memperkuat partisipasi masyarakat serta menghasilkan dampak yang terukur. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah kegiatan saja belum cukup untuk menggambarkan efektivitas FKBN dalam menjalankan perannya sebagai agen sosial.

Keterbatasan tersebut berkaitan dengan kapasitas organisasi, terutama dalam rekrutmen, regenerasi, dan pengelolaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perekrutan belum sepenuhnya mengutamakan calon

kader yang memiliki kemampuan organisasi dan manajemen program. Selain itu, keterbatasan jumlah anggota muda dan dominasi pengurus berusia lanjut dinilai menghambat munculnya gagasan, kreativitas, serta inovasi baru. Keterbatasan anggaran dan kendala perizinan kegiatan juga menghambat pelaksanaan program secara mandiri dan berkelanjutan. Di samping itu, koordinasi lintas sektor dan perbedaan pandangan antargenerasi menjadi tantangan dalam mengembangkan pendekatan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Konteks Sosial dan Budaya Masyarakat Lampung

Kondisi sosial dan budaya Lampung turut memengaruhi pelaksanaan program bela negara. Masyarakat Lampung memiliki latar belakang etnis dan budaya yang beragam. Sejarah transmigrasi, terutama kedatangan penduduk dari Jawa dan Bali, membentuk kehidupan sosial yang majemuk. Hidayah et al. (2024) menjelaskan bahwa perubahan komposisi penduduk tersebut turut memengaruhi posisi demografis masyarakat asli Lampung.

Berdasarkan data BPS (2025) yang dirujuk dalam penelitian ini, penduduk

beretnis Lampung tercatat sekitar 13%, sedangkan penduduk beretnis Jawa dan Bali mencapai sekitar 65%. Komposisi tersebut perlu dibaca dalam konteks kemajemukan penduduk dan proses pembentukan identitas sosial di Lampung. Dalam kehidupan sehari-hari, dominasi penduduk pendatang bahkan memunculkan ungkapan populer yang menggambarkan Lampung sebagai wilayah yang memiliki karakter sosial-budaya menyerupai Jawa.

Dari perspektif antropologis, budaya Jawa memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan sebagian masyarakat Lampung, terutama di wilayah dengan konsentrasi penduduk keturunan Jawa yang tinggi (Hidayah et al., 2024). Penggunaan bahasa Jawa dalam interaksi sehari-hari dan perkembangan gaya hidup perkotaan mencerminkan dinamika tersebut. Sementara itu, kedekatan dengan pusat-pusat ekonomi dan informasi, termasuk Jakarta, turut mempercepat perubahan sosial dan budaya, khususnya di kawasan perkotaan.

Dari perspektif sosiologis, masyarakat Lampung menunjukkan keterbukaan terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Struktur sosial masyarakat perkotaan mengalami

perubahan seiring dengan perkembangan modernisasi, sedangkan masyarakat perdesaan masih mempertahankan sejumlah karakteristik kehidupan agraris. Meski demikian, perubahan budaya juga menjangkau wilayah perdesaan. Proses akulturasi, asimilasi, dan perkawinan antaretnis menunjukkan intensitas interaksi antarkelompok masyarakat. Namun, kemajemukan dan perubahan sosial tersebut tetap memerlukan pengelolaan yang baik karena berpotensi disertai konflik sosial dan kriminalitas (Kurniadi et al., 2019).

Dalam konteks kebangsaan, kemajemukan Lampung dapat menjadi modal sosial untuk memperkuat identitas nasional dan nasionalisme. Sahadi (2017) mengaitkan nasionalisme dengan sikap cinta tanah air dan kerelaan berkorban. Namun, tingginya rasa nasionalisme tidak serta-merta menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami bela negara sebagai tanggung jawab seluruh warga negara, termasuk warga sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih mengaitkan bela negara dengan aktivitas militer, seperti mengangkat senjata dan berperang. Pandangan ini mempersempit pemahaman tentang bela negara dan

mengabaikan peran masyarakat dalam menghadapi ancaman nonmiliter, termasuk konflik sosial dan permasalahan lingkungan yang berdampak terhadap ketahanan nasional.

Kendala dan Tantangan Pelaksanaan FKBN

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi FKBN dan pelaksanaan programnya di Lampung. Sebagai organisasi yang diharapkan berperan dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, FKBN seharusnya mampu mengembangkan kegiatan yang menumbuhkan tanggung jawab sosial, wawasan kebangsaan, kedisiplinan, dan semangat gotong royong. Nilai-nilai tersebut penting untuk membentuk masyarakat yang tangguh dan mampu menghadapi perubahan sosial serta tantangan global. Namun, pelaksanaan FKBN di Lampung belum menunjukkan perkembangan yang sebanding dengan harapan tersebut.

Kondisi ini mencerminkan stagnasi dalam pengembangan organisasi dan pelaksanaan program. Stagnasi dapat dipahami sebagai keadaan ketika perkembangan tidak menunjukkan perubahan berarti dalam kurun waktu

tertentu (Zuhdi & Arif, 2023). Dalam konteks FKBN Lampung, kondisi tersebut terlihat dari terbatasnya inovasi, belum berkelanjutannya sejumlah kegiatan, serta ketergantungan pada program yang berasal dari tingkat pusat. Jika tidak ditangani, keadaan ini dapat menghambat peran FKBN sebagai mitra strategis Kementerian Pertahanan dalam mendukung program bela negara dan menggerakkan potensi sumber daya nasional.

Tantangan lainnya berasal dari perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Berdasarkan hasil wawancara, kader menghadapi kesulitan dalam menanamkan nilai-nilai bela negara di tengah masyarakat yang semakin terhubung secara digital. Pengaruh media sosial, arus informasi, dan globalisasi menuntut metode sosialisasi yang lebih adaptif. Di sisi lain, kader menilai bahwa partisipasi masyarakat masih terbatas, terutama di lingkungan perkotaan yang dinilai semakin individualistik. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi penguatan solidaritas sosial dan gotong royong sebagai bagian dari nilai bela negara.

Hambatan internal juga mencakup keterbatasan pendanaan, prosedur perizinan kegiatan yang dinilai berbelit,

serta kapasitas sumber daya manusia dalam organisasi. Dominasi pengurus berusia lanjut dan terbatasnya keterlibatan generasi muda dinilai memengaruhi pengembangan ide, kreativitas, motivasi, dan inovasi. Perbedaan pandangan antargenerasi turut memengaruhi pendekatan penanaman nilai bela negara. Generasi muda cenderung lebih intens berinteraksi dengan teknologi dan budaya global, sedangkan generasi tua dinilai lebih menekankan pemeliharaan nilai-nilai tradisional. Perbedaan tersebut memerlukan pendekatan komunikasi dan pembinaan yang mampu menjembatani kebutuhan kedua kelompok.

Selain itu, sebagian masyarakat masih memandang bela negara sebagai tanggung jawab militer semata. Persepsi tersebut dapat membatasi partisipasi warga sipil dalam upaya pertahanan negara. Padahal, penguatan pertahanan negara memerlukan sinergi antara komponen militer dan masyarakat sipil sesuai dengan peran masing-masing. Karena itu, FKBN perlu mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual agar masyarakat memahami bahwa bela negara juga diwujudkan melalui kontribusi sosial, kepatuhan terhadap hukum, pemeliharaan

lingkungan, penguatan persatuan, dan partisipasi dalam mengatasi berbagai permasalahan nonmiliter.

Secara konseptual, berbagai kendala tersebut menunjukkan perlunya integrasi perspektif antropologis dan sosiologis dalam pelaksanaan program FKBN. Pemahaman terhadap budaya lokal, struktur sosial, jaringan sosial, dan peran agen sosial diperlukan agar program bela negara tidak berhenti pada sosialisasi formal, tetapi dapat menyesuaikan diri dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Di tengah kemajemukan Lampung, pendekatan tersebut juga penting untuk membangun partisipasi lintas kelompok dan memperkuat nilai kebangsaan tanpa mengabaikan identitas budaya setempat.

Dengan demikian, tantangan FKBN Lampung tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan anggaran dan manajemen internal, tetapi juga dengan lemahnya inovasi program, terbatasnya regenerasi, kendala koordinasi, dan belum optimalnya pelibatan masyarakat. Penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan kemitraan strategis, regenerasi kader, serta penyesuaian metode pembinaan dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial-budaya menjadi langkah penting

untuk mengatasi stagnasi tersebut. Upaya ini diperlukan agar FKBN dapat berkembang menjadi organisasi yang inklusif, adaptif, dan responsif, sekaligus menjalankan peran yang lebih substantif dalam meningkatkan kesadaran bela negara dan mendukung ketahanan nasional.

Analisis Sosiologi Pertahanan melalui Teori Strukturasi

Sosiologi pertahanan mengkaji hubungan antara faktor sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan dengan penyelenggaraan pertahanan serta keamanan. Dalam perspektif ini, pemahaman terhadap pertahanan negara tidak hanya berkaitan dengan kekuatan militer, tetapi juga dengan nilai budaya, simbol, struktur sosial, dan jaringan sosial yang memengaruhi persepsi serta partisipasi masyarakat. Simbol dan nilai budaya dapat membangun identitas kolektif, sedangkan struktur dan jaringan sosial dapat memengaruhi mobilisasi sumber daya serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung pertahanan negara.

Dalam konteks bela negara, salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan masyarakat memahami pertahanan melalui oposisi

biner, khususnya antara kita dan mereka serta militer dan sipil. Oposisi pertama berkaitan dengan pembentukan batas identitas antara kelompok yang dipandang sebagai bagian dari bangsa dan pihak yang dianggap sebagai ancaman. Oposisi kedua merujuk pada perbedaan peran militer dan masyarakat sipil dalam pertahanan negara. Apabila dipahami secara kaku, perbedaan tersebut dapat membatasi pemahaman masyarakat bahwa bela negara juga merupakan tanggung jawab warga sipil. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam upaya bela negara berpotensi menjadi terbatas (Putra, 2001).

Untuk menganalisis hubungan antara struktur sosial dan tindakan masyarakat dalam konteks tersebut, penelitian ini menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens (1984). Teori ini menjelaskan hubungan timbal balik antara struktur sosial dan agensi. Struktur mencakup aturan dan sumber daya yang membentuk sekaligus memungkinkan tindakan sosial, sedangkan agensi merujuk pada kapasitas individu atau kelompok untuk bertindak dan menghasilkan konsekuensi sosial. Hubungan keduanya disebut dualitas struktur, yaitu struktur menjadi medium

bagi tindakan sosial sekaligus direproduksi melalui tindakan tersebut.

Giddens juga menekankan reflektivitas agen, yakni kemampuan untuk memantau dan mengevaluasi tindakan serta kondisi sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, agen bukan sekadar penerima pengaruh struktur, melainkan memiliki kapasitas untuk mempertahankan atau mengubah pola hubungan sosial melalui tindakan yang dilakukan. Namun, kapasitas tersebut tetap dipengaruhi oleh aturan, sumber daya, dan kondisi sosial yang tersedia.

Dalam penelitian ini, FKBN Provinsi Lampung diposisikan sebagai agen sosial yang berupaya meningkatkan kesadaran bela negara melalui sosialisasi, pembinaan kader, dan pelibatan masyarakat. Sementara itu, struktur yang memengaruhi tindakan FKBN mencakup kebijakan pertahanan, norma sosial, nilai budaya, pola hubungan sipil-militer, serta kondisi kelembagaan dan ketersediaan sumber daya. Struktur tersebut dapat mendukung pelaksanaan program, tetapi juga dapat membatasi kemampuan FKBN dalam mengembangkan kegiatan secara mandiri dan berkelanjutan.

Hubungan antara struktur dan agensi dalam pelaksanaan bela negara

dapat dianalisis melalui tiga aspek. Pertama, reproduksi struktur, yaitu bagaimana kebijakan, norma, dan praktik sosial yang berlangsung terus-menerus membentuk pemahaman masyarakat mengenai bela negara. Kedua, kapasitas agensi, yaitu sejauh mana FKBN dan masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya serta mengembangkan tindakan untuk meningkatkan kesadaran bela negara. Ketiga, transformasi sosial, yaitu bagaimana tindakan FKBN dan partisipasi masyarakat dapat mengubah pemahaman, pola interaksi, serta praktik bela negara di lingkungan sosialnya.

Analisis ini juga memperhatikan konteks sosial dan historis yang memengaruhi hubungan antara struktur dan agensi. Dalam masyarakat Lampung yang majemuk, perbedaan latar belakang budaya, perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan pola interaksi antargenerasi dapat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap program bela negara. Oleh karena itu, keberhasilan FKBN tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh kemampuannya memahami karakteristik masyarakat, membangun jaringan sosial, dan menyesuaikan pendekatan pembinaan dengan kebutuhan lokal.

Berdasarkan kerangka tersebut, teori strukturasi digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan, norma sosial, keterbatasan kelembagaan, dan sumber daya memengaruhi pelaksanaan program FKBN Lampung, sekaligus bagaimana tindakan organisasi dan masyarakat dapat mempertahankan atau mengubah kondisi tersebut. Keterbatasan inovasi, regenerasi kader, pendanaan, dan partisipasi masyarakat dapat dianalisis sebagai faktor yang membatasi kapasitas agensi FKBN. Sebaliknya, penguatan kapasitas organisasi, kemitraan lintas sektor, dan pendekatan yang sesuai dengan konteks sosial-budaya dapat memperluas kemampuan FKBN dalam mengembangkan program secara berkelanjutan.

Dengan demikian, teori strukturasi memberikan kerangka untuk memahami kendala FKBN Lampung sebagai hasil interaksi antara struktur sosial dan kapasitas agensi, bukan semata-mata sebagai kelemahan organisasi. Perspektif ini membantu menjelaskan mengapa keberadaan kebijakan dan program bela negara belum tentu menghasilkan partisipasi masyarakat yang optimal, serta bagaimana perubahan pada tingkat kelembagaan dan praktik sosial dapat mendukung peningkatan kesadaran bela

negara dan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.

Kesimpulan, Rekomendasi dan Pembatasan

FKBN di Lampung telah melaksanakan berbagai kegiatan bela negara, tetapi masih menghadapi keterbatasan kapasitas organisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Wacana yang memaknai bela negara secara sempit sebagai tanggung jawab militer dan negara turut membatasi keterlibatan masyarakat. Dalam perspektif teori strukturasi, kondisi ini menunjukkan bahwa struktur sosial dapat memengaruhi tindakan agen, sementara agen juga memiliki peluang untuk mengubah struktur melalui praktik sosial yang dilakukan secara reflektif.

Keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, dan infrastruktur menjadi kendala bagi FKBN dalam menjalankan perannya. Partisipasi masyarakat yang belum optimal juga menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat. Perbedaan pemaknaan bela negara antara FKBN dan masyarakat perlu dikaji lebih lanjut agar tidak langsung dianggap sebagai benturan budaya. Selain itu, interaksi dan koordinasi antara unsur sipil dan militer

perlu diperkuat agar program bela negara lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Secara sosiologis, peningkatan kesadaran bela negara memerlukan interaksi dan kolaborasi yang lebih intensif antara FKBN, unsur militer, dan masyarakat. Secara antropologis, pelaksanaan program perlu mempertimbangkan nilai, tradisi, dan kebutuhan masyarakat Lampung. Dengan demikian, FKBN dapat mengembangkan pendekatan yang kontekstual dan mendorong penerapan nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini merekomendasikan agar FKBN di Lampung memperkuat kapasitas organisasi melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dukungan pendanaan, dan penyediaan infrastruktur yang memadai. FKBN juga perlu mengembangkan program yang lebih fleksibel, partisipatif, dan sesuai dengan konteks lokal. Kolaborasi antara unsur sipil dan militer perlu diperkuat melalui koordinasi yang berkelanjutan serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan relevansi program dan memperluas

partisipasi masyarakat dalam kegiatan bela negara.

Penelitian ini terbatas pada konstruksi makna bela negara dalam konteks masyarakat Lampung. Oleh karena itu, temuan penelitian tidak dapat digeneralisasi secara langsung ke wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial dan budaya berbeda. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan komparatif untuk mengkaji pemaknaan bela negara pada masyarakat dengan karakteristik sosial dan budaya yang beragam, termasuk membandingkan konteks yang relatif homogen dan heterogen.

Daftar Pustaka

- Akbar, R. S., Aji, M. B. K., Zhilal, M. F. Z., Aurora, D., Akbar, L. M., Khotimah, A. K., Rozansyah, D. Z., & Ragachdo, F. (2024). Urgensi Bela Negara untuk Meningkatkan Jiwa Nasionalisme Dan Peranannya dalam Intergrasi Nasional. *Journal on Education*, 6(4), 18552–18563.
- Akbar, R. S., Ashari, H. A. A., Suharsono, J. P., Ramadanti, G., M Apriansyah, R., Sulistiyawan, H., & Triandeda, K. D. (2024). Urgensi Pendidikan Bela Negara di Era Society 5.0 (Tantangan dan Peluang). *Journal on Education*, 6(4), 19343–19354.
- Akbar, R. S., Iskandar, T., Abadi, M. D., Bachtiar, S., Khomaidi, M. I., Damayanti, T. O., Prasetyo, M. A., & Renhard, R. (2024). Memperkuat Ketahanan Nasional: Aktualisasi

- Bela Negara Melalui Literasi Digital. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 16(2), 253–261.
- Azzahra, L., Robbani Hikmah Kautsar, Galih Lintang Asmarandhanadana, Lintang Berliana Putri, & Adiasta Aulia Putri. (2024). Kesadaran Bela Negara Memahami Pengertian, Nilai-Nilai, dan Implementasinya dalam Membentuk Karakter Bangsa. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 9(6), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v9i6.8573>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Provinsi Lampung Dalam Angka 2025*.
- Cahyani, I. P., Bulan, W. R., & Sembada, W. Y. (2020). Organizational Strengthening of Forum Bela Negara DKI Jakarta through Event Management. *MITRA: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 62–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.25170/mitra.v4i1.1067>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2008). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. SAGE.
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Out line of the theory of Structuration*. Berkeley and LA: University of California Press.
- Gredinand, D. (2017). Penerapan Pendidikan Bela Negara di Perguruan Tinggi. *Jurnal Strategi Pertahanan Darat (JSPD)*, 3(2), 1–27.
- Gusti, M. F., Asfuri, S. E., Nugroho, A. H. A., Putra, B. H., Rahmansyah, S. S., & Puspita, R. K. (2025). Bela Negara dalam Krisis Kepercayaan Publik: Tantangan Membangun Solidaritas Sosial di Era Pemerintahan Baru. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(6), 12187–12193.
- Hakim, H. A., Pane, A., & Erlangga, W. D. (2020). Politik Hukum Implementasi Kesadaran Bela Negara Sumber Daya Manusia dalam Menjaga Pertahanan dan Keutuhan NKRI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengeleolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. *Fairness and Justice Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(2), 54–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.32528/faj.v18i2.6537>
- Hartono, D. (2022). Fenomena Kesadaran Bela Negara di Era Digital dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(1), 14–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.55960/jlri.v8i1.301>
- Herawati, T., Muchlis, M., Saksono, M. S., & Leandro, S. F. (2025). Persepsi Mahasiswa Di Magelang terhadap Perekrutan Warga Negara sebagai Komponen Cadangan TNI. *JURNAL MAHATVAVIRYA*, 12(1), 47–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.63824/jmp.v12i1.291>
- Hidayah, F. N., Susanti, L., Prayogi, R., & Riadi, B. (2024). Dampak Kultural Mayoritas Jawa terhadap Minoritas Lampung di Desa Parerejo. *Saka Bahasa: Jurnal Sastra, Bahasa, Pendidikan, Dan Budaya*, 1(1), 11–17. <https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/saka/article/view/279>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2019). *Tataran Dasar Bela Negara dalam Gerakan Nasional Bela Negara (Modul PKBN Seri 3 Wajib)*. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI.
- Kementerian Pertahanan RI. (2023). *Peta Persebaran Kader Bela Negara*. Kementerian Pertahanan RI.

- Kurniadi, A., Legionosuko, T., & Poespitoahadi, W. (2019). Transformasi Konflik Sosial antara Etnis Bali dan Lampung dalam Mewujudkan Perdamaian di Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 9(1), 91–108.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i1.501>
- Leonardi, A. (2014). Pengaruh Sosialisasi Bela Negara terhadap Sikap Bela Negara Guru Sekolah Dasar di Jakarta (Studi Eksplanatori di Direktorat Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia). *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 1(4), 443–467.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37058/jipp.v1i4.2270>
- Maharani, D., Rusyda, S., Novarina, F., Purba, C. D. A., Agustin, T., & Ghozali, I. (2024). Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara. *International Proceedings the Journal of Community Service*, 1(1), 1–6.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30651/ipjcs.v1i1.11>
- Midhio, I. W., Suprpto, S., & Nugraha, F. A. (2019). Peran Komite Nasional Pemuda Indonesia dalam Menanamkan Nilai-Nilai Bela Negara di Provinsi DKI Jakarta. *Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Pertahanan*, 5(1), 89–110.
- Miharja, D. S., Sukrisna, C., & Purwaningsih, E. (2024). Peran Pendidikan Pertahanan dalam Membangun Kesadaran Keamanan Nasional di Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan*, 1(2), 62–72.
<https://doi.org/https://doi.org/10.63210/jp3.v1i2.106>
- Nabawi, M., & Ummah, K. C. (2024). Penanaman Nilai–Nilai Sosial dalam Pendidikan Bela Negara: Studi Kasus Pada Pemuda di Kabupaten Pamekasan Madura. *Prosiding SenSosio (Seminar Nasional Prodi Sosiologi)*, 5(1), 123–136.
- Novyanti, N. H. D., Legionosuko, T., & Siswoyo, M. (2019). Strategi Internalisasi Nilai–Nilai Bela Negara dalam Kontra Radikal pada Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jakarta. *Peperangan Asimetris (PA)*, 5(1), 19–40.
- Putra, H. S. A. (2001). *Strukturalisme Lévi-Strauss: Mitos dan Karya Sastra*. Yayasan Adikarya IKAPI dan the Ford Foundation.
- Putri, H. R., Metiadini, A., Rahmat, H. K., & Ukhsan, A. (2020). Urgensi Pendidikan Bela Negara Guna Membangun Sikap Nasionalisme pada Generasi Millennial di Indonesia. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 5(2), 257–271.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/muaddib.v5i2.257-271>
- Putriana, M. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara di PUSDIKLAT Bela Negara kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Universitas Negeri Jakarta.
- Roringkon, D. L., & Aris Sarjito. (2021). Pemberdayaan Kaum Milenial Sebagai Kader Bela Negara. *SOSTECH: Jurnal Sosial Dan Teknologi*, 1(7), 707–716.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i7.132>

- Sahadi, S. (2017). Implementasi Pelatihan Kader Bela Negara di Rindam Jaya Guna Mendukung Pertahanan Negara. *Strategi Pertahanan Darat (JSPD)*, 3(3), 15–34.
- Sebastian, E. (2015). Peningkatan Peranan SDM Pertahanan Nasional Guna Menghadapi Perang generasi Keempat. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 5(1), 109–128.
- Soepandji, K. W., & Farid, M. (2018). Konsep Bela Negara dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 436–456. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1741>
- Strauss, C. L. (1974). Structural Anthropology. *Persona & Derecho*, 1, 571.
- Subagyo, A. (2019). Rencana Aksi Nasional Bela Negara. *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 2(01), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.81>
- Sukowati, A. P., Sholihah, S. N. Q., Sholikhah, N., Febrianti, R. T., Saputri, L. W., & Ghozali, I. (2024). Meningkatkan Kesadaran Bela Negara dengan Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila di Era Globalisasi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 184–194. <https://doi.org/https://doi.org/10.3342/jkepmas.v1i2.143>
- Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wahyudi, W. (2017). Peran Kader Bela Negara di Kawasan Perbatasan dalam Dinamika Hubungan Lintas Batas Negara: Studi Tentang Peran Forum Bela Negara di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 7(3), 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.33172/jpbh.v7i3.227>
- Yusuf, K. H. (2023). Peran Sosiologi Militer dalam Pertahanan dan Keamanan Negara. *Nusantara Hasana Journal*, 2(8), 335–348.
- Zuhdi, A., & Arif, E. (2023). Komunikasi Keluarga pada Kasus Stagnasi Pendidikan Keluarga Nelayan. *Jurnal Audiens*, 4(3), 454–467. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jas.v4i3.120>
- Zulkarnain, I., & Runturambi, A. J. S. (2022). Sumber Daya Nasional Komponen Cadangan dalam Memperkuat Ketahanan Negara. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 9937–9949. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9960>